



PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto

RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto - Jawa Timur (0321) 321948
e-mail : dpmd.kabmojokerto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

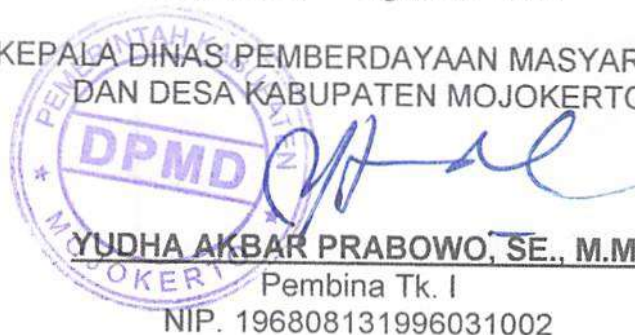
Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196808131996031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	49
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	87
BAB V PENUTUP	105
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	105
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	106
5.3. Rencana Tindak Lanjut	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, Renja Provinsi dan Renja K/L, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman

dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;

29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan dalam bab ini berisi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto
Periode Pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022**

N o	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renta perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	Aksi								
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12				13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terwuj udnya Tata Kelola Birokra si Perang kat Daerah yang Berinte gritas, Akunta bel, Bersih dan Transp aran		Nilai Reforma si Birokrasi (RB) Perangk at Daerah																							
		1. Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/ Kota	1.1 Nilai SAKIP Perangk at Daerah	85, 8	37,436, 469,438	-	0	83,7 6	5,851,1 25,608	0	875,266 ,776	0	1,296, 223,34 3	84, 39	1,125,3 24,427	0	1,740, 775,76 8	84, 39	100. 75%	5,037,5 90,314	86.10 %	84, 39	5,037,590 ,314	-	-	

		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Perse ntase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	95	460,000,000	91		91	17,500,000	79	3,360,000	8	1,010,000	43,39	6,102,000	32,6	5,208,500	162,99	179.11%	15,680,500	-	91	15,680,500	95,79	-		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	38	260,000,000	6	50000000	6	10,000,000	2	2,249,500	2	0	1	4,135,000	1	2,479,000	6	100.00%	8,863,500	-	6	58,863,500	85,71	98,11		
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	90	200,000,000	18	40000000	18	7,500,000	6	1,110,500	5	1,010,000	4	1,967,000	3	2,729,500	18	100.00%	6,817,000	-	18	46,817,000	100	117,04		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Perse ntase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	31,615,060,830	90		90	5,191,017,000	14	782,713,064	11	1,178,156,891	37,18	1,007,945,288	26,33	1,283,460,000	88,51	98.34%	4,252,275,243	-	90	4,252,275,243	100	-		

		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.1 Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	84	31,395,060,830	14	4954129353	14	5,191,017,000	3	782,713,064	4	1,178,156,891	4	1,007,945,288	3	1,283,460,000	14	100.00%	4,252,275,243	-	14	9,206,404,596	100	121,41		
		3. Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	3.1 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80	125,500,000	76		76	285,000,000	59	0	6	0	5	0	9,24	78,967,960	79,24	104.26%	78,967,960	-	76	78,967,960	95	-		
		1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau	0	0	648	285000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	-	648	285,000,000	1,580.49	712,5			
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	3.1 Jumlah Pakaian Dinas beserta	42	145,900,000	32	38400000	32	38,400,000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	36,544,000	32	100.00%	36,544,000	91,360.00%	32	74,944,000	76,19	214,13			

		Atribut Kelengkapannya	Perengkapannya yang tersedia																								
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	44,000,000	32	44000000	32	44,000,000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	42,423,960	32	100.00%	42,423,960	-	32	86,423,960	-	-			
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.1Persepsi Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90	2,154,100,000	90		90	200,000,000	25	31,584,000	25	47,204,000	25	53,496,300	15	91,881,750	90	100.00%	224,166,050	-	90	224,166,050	100	-		
		1. Penyediaan Peralatan	4.1 Jumlah penyediaan	29	710,500,000	5	90000000	5	65,000,000	2	4,697,000	3	4,910,000	0	26,173,800	0	26,495,800	5	100.00%	62,276,600	62.28%	5	152,276,600	100	84,6		

			dan Perlengka pan Kantor	Peralata n dan Perlengka pan Kantor																									
			2. Penyedia an Bahan Logistik Kantor	4.1 Jumlah waktu penyedi aan Makana n dan Minuma n dalam Pelaksan aan Kegiatan	12	267,100 ,000	12	400000 00	12	36,000, 000	3	9,358,0 00	3	8,352, 000	3	12,702, 000	3	4,746, 000	12	100. 00%	35,158, 000	11.72 %	12	75,158,00 0	100	121, 22			
			3. Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan	4.1 Jumlah waktu penyedi aan Barang Cetakan dan Peggan daan	12	233,200 ,000	12	400000 00	12	30,000, 000	3	4,824,5 00	3	6,754, 400	3	0	3	18,112 ,200	12	100. 00%	29,691, 100	-	12	69,691,10 0	100	126, 71			
			4. Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan	4.1 Jumlah waktu penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng	12	25,100, 000	12	400000 0	12	4,000,0 00	3	915,000	3	915,00 0	3	915,00 0	3	915,00 0	12	100. 00%	3,660,0 00	1.30 %	12	7,660,000	100	127, 67			

			Undangan																							
		5. Penyediaan Bahan / Material	4.1 Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12	228,200,000	12	35000000	12	30,000,000	3	3,929,500	3	8,975,500	3	6,685,500	3	10,337,750	12	100.00%	29,928,250	-	12	64,928,250	100	118,05	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.1 Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat	12	690,000,000	12	120000000	12	81,000,000	3	7,860,000	3	17,297,100	3	7,020,000	3	31,275,000	12	100.00%	63,452,100	-	12	183,452,100	100	114,66	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1 Persepsi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90	1,077,758,608	90		90	157,608,608	50	38,887,712	10	38,899,452	20	38,900,839	10	34,271,058	90	100.00%	150,959,061	-	90	150,959,061	100	-	

		1. Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1 Jumlah waktu penyedi aan Jasa Komunik asi, air Bersih dan Listrik	12	65,650,000	12	10000000	12	9,500,000	3	1,860,560	3	1,872,300	3	1,873,687	3	1,872,300	12	100.00%	7,478,847	-	12	17,478,847	100	105,93		
		2. Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	5.1 Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayana n umum kantor yg tersedia	8	1,012,108,608	8	148108608	8	148,108,608	0	37,027,152	8	37,027,152	0	37,027,152	0	32,398,758	8	100.00%	143,480,214	-	8	291,588,822	100	110,45		
		6. Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	6.1Perse ntase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	1,814,050,000	90		90	95,000,000	70	18,722,000	10	30,953,000	5	18,880,000	10	246,986,500	95	105.56%	315,541,500	-	90	315,541,500	100	-		

		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.1 Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	794,250,000	12	150000000	12	95,000,000	3	14,145,000	3	16,220,000	3	18,190,000	3	42,224,700	12	100.00%	90,779,700	-	12	240,779,700	100	140,19		
		2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah waktu pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	168,000,000	12	20000000	12	35,000,000	3	4,577,000	3	14,733,000	3	690,000	3	14,950,000	12	100.00%	34,950,000	-	12	54,950,000	100	122,11		

		3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah waktu Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	693,000,000	12	210000000	12	190,000,000	0	0	0	0	0	0	12	189,811,800	12	100.00%	189,811,800	-	12	399,811,800	100	275,73		
2	Meningkatnya Status Perkembangan Desa Melalui Penataan Desa, Kerjasama Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa serta Pember		Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun																								
		1. Program Penataan Desa	1.1 Persentase Penyeleenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	100	1,650,000,000	-	0	20	150,000,000	0	8,522,000	0	0	20	40,670,000	0	199,969,850	20	100.00%	249,161,850	166.11%	20	249,161,850	-	-		

	dayaan Lembag a Kemasy arakata n, Lembag a Adat dan Masyar akat Hukum Adat	1. Penyelen ggaraan Penataan Desa	1.1Caku pan tujuan penyele nggaraa n penataa n desa yang dilaksan akan sesuai ketentua n	5	1,650,0 00,000	5		5	150,000 ,000	1	8,522,0 00	1	0	3	40,670, 000	0	199,96 9,850	5	100. 00%	249,161 ,850	-	5	249,161,8 50	100	-		
		1. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	1.1 Jumlah Sarana dan Prasaran a Desa yang terfasilit asi	4	1,650,0 00,000	4	250000 000	4	250,000 ,000	0	8,522,0 00	0	0	4	40,670, 000	0	199,96 9,850	4	100. 00%	249,161 ,850	201.6 3%	4	499,161,8 50	100	124, 79		
		2. Program Peningkat an Kerjasam a Desa	1.2 Persenta se Peningk atan Kerja sama Desa	10	2,690,0 00,000	-	0	10	150,000 ,000	5	5,159,0 00	3	3,509, 000	3	40,490, 000	0	116,82 4,850	11	110. 00%	165,982 ,850	110.6 6%	11	165,982,8 50	-	-		
		1. Fasilitas Kerja sama antar Desa	1.1Jumla h Desa yang terfasilit asi dalam kerja sama	22 0	2,690,0 00,000	22 0		220	150,000 ,000	11 0	5,159,0 00	4 0	3,509, 000	40	40,490, 000	30	116,82 4,850	220	100. 00%	165,982 ,850	-	22 0	165,982,8 50	100	-		

			Antar Desa																									
		1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupate n / Kota	1.1 Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupat en/Kota yang dilaksan akan	13	1,715,0 00,000	13	300000 000	13	130,000 ,000	6	2,109,0 00	7	2,016, 000	0	37,928, 000	0	79,723 ,850	13	100. 00%	121,776 ,850	1,546 .37%	13	421,776,8 50	100	105, 44			
		2. Fasilitasi Pembang unan Kawasan Perdesaa n	1.1 Jumlah fasilitasi pembent ukan dan pengem bangan Kawasan Perdesaa n	6	975,000 ,000	1	150000 000	1	50,000, 000	0	3,050,0 00	0	1,493, 000	0	2,562,0 00	1	37,101 ,000	1	100. 00%	44,206, 000	-	1	194,206,0 00	100	77,6 8			
		3. Program Administ rasi Pemerint ahan Desa	1.3 Persenta se Desa yang menyele nggarak an mekanis me penyele nggaraa n Pemerin	92	56,885, 000,000	-	0	91	7,775,0 00,000	66 ,9 9	1,124,2 39,322	3 0	2,222, 575,11 6	0	1,884,5 33,903	2, 41	3,684, 135,55 0	99, 4	109. 23%	8,915,4 83,891	114.6 7%	99, 4	8,915,483 ,891	-	-			

			tahan Desa secara tepat																								
		1. Pembinaa n dan Pengawas an Penyelen ggaraan Administ rasi Pemerint ahan Desa	1.1Perse ntase Desa yang mendap at Pembina an dan Pengawa san Penyele nggaraa n Administ rasi Pemerin tahan Desa	10 0	56,885, 000,000	10 0		100	7,775,0 00,000	50	1,110,3 96,022	2 0	2,218, 825,11 6	20	1,833,2 08,403	10	3,597, 901,95 0	100	100. 00%	8,760,3 31,491	-	10 0	8,760,331 ,491	100	-		
		1. Fasilitasi Penyelen ggaraan Administ rasi Pemerint ahan Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilit asi dalam Pendamp ingan Kegiatan Pemerin tahan Desa	29 9	1,250,0 00,000	29 9	100000 000	299	175,000 ,000	37	7,200,0 00	1 6	10,560 ,000	10 2	58,772, 850	14 4	94,069 ,200	299	100. 00%	170,602 ,050	1,706 .02%	29 9	270,602,0 50	100	77,3 1		

		2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	299	975,000,000	150	100000000	150	125,000,000	0	0	0	0	0	0	150	123,665,100	150	100.00%	123,665,100	-	150	223,665,100	50,17	74,56		
		3. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299	1,750,000,000	299	200000000	299	180,000,000	0	15,288,500	146	6,766,000	153	99,468,750	0	32,612,000	299	100.00%	154,135,250	-	299	354,135,250	100	70,83		
		4. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	299	4,200,000,000	299	650000000	299	1,065,725,000	150	13,500,000	149	24,615,000	0	24,550,000	0	942,013,471	299	100.00%	1,004,678,471	-	299	1,654,678,471	100	165,47		

		5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.1 Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299	1,550,000,000	299	200000000	299	275,000,000	0	0	299	45,623,000	0	0	0	200,647,000	299	100.00%	246,270,000	2,462.70%	299	446,270,000	115,89	111,57		
		6. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.1 Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	299	1,050,000,000	41	300000000	41	250,000,000	0	3,850,000	0	32,559,000	41	28,729,000	0	162,038,000	41	100.00%	227,176,000	324.54%	41	527,176,000	410,000.00	5,271,760.00		
		7. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian	299	750,000,000	100	100000000	100	30,000,000	16	4,975,800	21	2,650,000	0	2,293,000	20	8,266,000	57	57.00%	18,184,800	12.12%	100	118,184,800	100	59,09		

			Perangk at Desa																								
		8. Fasilitasi Penyusun an Profil Desa	1.1 Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdat e	30 4	1,400,0 00,000	30 4	100000 000	304	65,000, 000	33	1,181,0 00	1 6 1	1,948, 000	26	17,880, 000	84	41,120 ,050	304	100. 00%	62,129, 050	17.84 %	30 4	162,129,0 50	100	40,5 3		
		9. Fasilitasi Pengelola an Aset Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilit asi dalam pengelol aan asetnya	29 9	1,625,0 00,000	15 0	200000 000	150	50,000, 000	7	0	2 4	6,285, 675	15	9,882,6 75	10 4	23,525 ,459	150	100. 00%	39,693, 809	79.39 %	15 0	239,693,8 09	50, 17	59,9 2		
		10. Pembinaa n Peningkat an Kapasitas Anggota BPD	1.1 Jumlah BPD yang mendap atkan pelatiha n dalam bidang pemerin tahan desa	29 9	1,500,0 00,000	15 0	200000 000	150	100,000 ,000	65	25,472, 000	1 6	0	19	2,818,8 00	50	70,260 ,000	150	100. 00%	98,550, 800	-	15 0	298,550,8 00	50, 17	74,6 4		
		11. Pelaksana an Penugasa n Urusan / Kewenan	1.1 Jumlah Kepala Desa dan Perangk at Desa	29 9	35,000, 000,000	29 9	650000 0000	299	6,800,0 00,000	0	1,015,3 58,722	2 9 9	2,056, 427,44 1	0	1,546,8 76,028	0	1,581, 759,92 0	299	100. 00%	6,200,4 22,111	-	29 9	12,700,42 2,111	100	169, 34		

		gan Kabupate n / Kota yang Dilaksana kan oleh Desa	yang terfasilit asi dalam pelayana n Kesehat an (Asurans i BPJS)																							
		12. Fasilitasi Evaluasi Perkemb angan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.1 Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkemb angan Desa serta Lomba Desa dan Keluraha n yang dilaksan akan	30 4	3,400,0 00,000	30 4	500000 000	304	417,500 ,000	18	23,570, 000	2 8 6	31,391 ,000	0	41,937, 300	0	317,92 5,750	304	100. 00%	414,824 ,050	518.5 3%	30 4	914,824,0 50	100	114, 35	
			1.2 Persenta se BUMDes a dengan kategori maju dan berkemb ang	39	2,435,0 00,000	35		35	50,000, 000	0	13,843, 300	3 1, 6 5	3,750, 000	2,5 1	51,325, 500	1, 4	86,233 ,600	35, 56	101. 60%	155,152 ,400	-	35	155,152,4 00	89, 74	-	

		1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	2.1 Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa	150	2,435,000,000	75	310000000	75	163,750,000	70	13,843,300	39	3,750,000	22	51,325,500	68	86,233,600	199	265.33%	155,152,400	-	75	465,152,400	50	77,53		
		4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.4 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	89	17,725,000,000	86	0	85	695,000,000	77,65	54,211,600	3,95	117,242,000	3,04	296,033,050	4,25	527,466,400	88,89	104.58%	994,953,050	143.16%	174,89	994,953,050	198,74	-		
		1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	1.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga	75	17,725,000,000	75		75	695,000,000	33	54,211,600	17	117,242,000	20	296,033,050	5	527,466,400	75	100.00%	994,953,050	-	75	994,953,050	100	-		

		Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan																							
		1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pembed	23 24	3,450,000,000	27 2	500000000	272	100,000,000	98	10,662,600	88	24,748,000	0	16,050,000	150	37,051,250	336	123.53%	88,511,850	-	272	588,511,850	44,74	69,24	

[illegible]

		3. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.1 Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304	1,700,000,000	304	300000000	304	200,000,000	18	7,349,000	286	16,575,000	0	32,044,050	0	135,156,000	304	100.00%	191,124,050	3,185.40%	304	491,124,050	100	122,78		
		4. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.1 Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323	7,075,000,000	323	127500000	323	425,000,000	18	14,858,000	305	63,420,000	0	61,700,000	0	243,077,650	323	100.00%	383,055,650	-	323	1,658,055,650	100	103,63		
			1.5 Persentase Lembaga Ekonomi Desa	80	5,250,000,000	30	0	72	100,000,000	69,16	3,664,000	1,24	6,466,000	8,29	8,932,000	0	208,622,300	78,69	109.29%	227,684,300	227.68%	108,69	227,684,300	108,69	-		

			yang Aktif																								
		1. Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n / Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupate n / Kota	1.1Perse ntase Lembaga Kemasya rakatan yang bergerak dibidang pemberd ayaan ekonomi produkti f dan diberday akan	70	5,250,0 00,000	70		70	100,000 ,000	28 ,8 5	3,664,0 00	2 0, 1 5	6,466, 000	11	8,932,0 00	10	208,62 2,300	70	100. 00%	227,684 ,300	-	70	227,684,3 00	100	-		

		1. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.1 Jumlah fasilitas pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	100	2,500,000,000	100	400000000	100	68,750,000	20	3,664,000	40	0	20	7,882,000	20	57,191,100	100	100.00%	68,737,100	-	100	468,737,100	100	78,12		
		2. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.1 Jumlah fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100	2,750,000,000	100	400000000	100	160,000,000	8	0	8	6,466,000	40	1,050,000	44	151,431,200	100	100.00%	158,947,200	-	100	558,947,200	100	93,16		
		Rata - rata capaian kinerja (%) :																117,73									
Predikat kinerja :																Sangat baik											

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :	Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Permodalan BUMDesa serta Program Jatim Puspa melalui BKK Provinsi Jawa Timur bisa mendorong masyarakat desa dalam berperan aktif untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Adanya bantuan CSR dari Bank Jatim berupa pra sarana untuk memfasilitasi Pembinaan Pengurus BUMDesa Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas bisa dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode pelatihan dengan metode hybrid (tatap muka maupun daring/online). Adanya sarana media social bisa digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya. Adanya inovasi Klinik DESWITA diharapkan dapat menampung segala permasalahan dan sebagai tempat informasi terkait BUMDesa. Pendampingan kegiatan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan PLD dalam proses transformasi UPK eks PNPM Md. Perdesaan menjadi BUMDesma.
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :	Rendahnya pagu anggaran pada APBD Tahun 2022, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan. Adanya moratorium pelaksanaan pengisian perangkat Desa mulai 1 Juli 2022 s/d saat ini berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Tanggal 30 Juni 2022 nomor 141/3932/1-112/2022 perihal Penundaan Pengisian Lowongan Perangkat desa, sehingga untuk Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak bisa dilaksanakan di Triwulan III ini. Jumlah Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sangat banyak dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto karena terbatasnya anggaran. Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia. Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan usahanya, salah satu cara BUMDes bisa mendapatkan modal dengan tidak bergantung dana Pemerintah, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa. Pembentukan BUMDesma dari transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan masih terkendala oleh perubahan Regulasi yang baru dari Pemerintah Pusat serta banyaknya tahapan dan persyaratan yang harus dilalui. BUMDesa-BUMDesa yang baru merintis dan baru tumbuh, sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala dari Dinas PMD Kabupaten, tetapi terkendala oleh Tenaga Personil dan Anggaran DPMD yang sangat terbatas.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya *) :	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya *) :	

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan IV Tahun 2022, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan VI tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2021 dan atau realisasi APBD Tahun 2022. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2022)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 4 Th. 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	95%	90%	91%	91%	100%	91%	91 %	97,8 %
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	13 Dokumen	100 %

2	1 3	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2	1 3	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
2	1 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang tersusun	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100 %
2	1 3	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 Bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang tersedia	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	8 orang	7 orang	7 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	10%	10%	10%	10%	100%	10 %	10 %	100%
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan desa yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	1 3	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10 %	100%
2	1 3	0 2	2.0 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa yang dilaksanakan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%
					Rincian :									
					Pembinaan dan Pembentukan BUMDESMA dari Hasil PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	1,05 %	13 Kec	13 Kec	100%

					Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri	Jumlah UPK PPK Mandiri yang mendapat pembinaan Pengelola Keuangan, Fasilitas, Koordinasi dan Monitoring	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	112%	11 Kec	11 Kec	100%
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih	80%	80%	80%	80%	-	80%	71,6%	89,5%
2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
					Rincian :									
					Pendampingan Penyusunan APB Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan APB Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%

					Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Dana Desa (DD)	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pengelola keuangan desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Jumlah Desa yang terfasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa									
					Rincian :									-
					Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	75 Desa	54 Desa	54 Desa	75 Desa	130 %	229 Desa	229 Desa	100%
					Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat pelatihan manajemen BUMDesa	100 pengurus	100 pengurus	100 pengurus	100 pengurus	100%	100 pengurus	100 pengurus	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	100%	149 Desa	149 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%

2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	155 Desa	155 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah waktu penyediaan pelayanan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Asuransi BPJS)	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan									
					Rincian :									
					Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang dievaluasi Tingkat Perkembangannya	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
					Fasilitasi/Pendampingan Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang dievaluasi status desanya berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto	Jumlah desa yang mendapat pendampingan sebagai desa binaan yang mandiri	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	6 Desa	100%
2	1 3	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	92%	92%	92%	92%	100%	92%	95.5%	103,8%

2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang dibina	763 lembaga	763 lembaga	763 lembaga	763 lembaga	100%	763 lembaga	761 lembaga	99,7%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
					Rincian :									
					Pelestarian & Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan pembinaan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Pemberdayaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokja Posyandu Desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%

					Fasilitasi / Pendampingan PMT- AS	Jumlah Fasilitasi/ Pendampingan PMT- AS yang dilaksanakan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
					Rincian :									
					Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	150 KPM	150 KPM	150 KPM	150 KPM	100%	100 KPM	115 KPM	115%
					Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	Jumlah kader PKK yang mengikuti peningkatan kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	304 Kader	152 Kader	304 Kader	304 Kader	100%	152 Kader	152 Kader	100%
					Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)	Jumlah pengurus PKK yang mendapatkan pembinaan SDM dan Kelembagaan PKK	152 pengurus	152 pengurus	152 pengurus	152 pengurus	100%	152 pengurus	152 pengurus	100%
					Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang mendapatkan pembinaan	150 LPM	150 LPM	150 LPM	150 LPM	100%	150 LPM	177 LPM	118%
					Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RW yang mendapatkan pelatihan kelembagaan desa	75 orang	75 orang	-	-	-	75 orang	75 orang	100%

2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
					Rincian :									
					Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat Pembinaan Administrasi PKK	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Perlombaan PKK Bidang umum	Jumlah TP PKK yang mengikuti Perlombaan PKK Bidang umum	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto	180 pengurus	180 pengurus	180 pengurus	180 pengurus	100%	180 pengurus	168 pengurus	93,3%
					Publikasi Program PKK	Jumlah Program Kerja PKK Kab. Mojokerto yang terpublikasi	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	100%	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	100%
					Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	600 pengurus	240 pengurus	600 pengurus	600 pengurus	100%	240 pengurus	240 pengurus	100%
					Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	Jumlah Kader PKK yang mengikuti kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%

					Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina	319 lembaga	319 lembaga	280 lembaga	280 lembaga	100%	319 lembaga	319 lembaga	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									

					Rincian :									
					Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibina dan dilatih	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok perempuan yg mendapatkan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri.	36 kelompok	36 kelompok	-	-	-	54 kelompok	54 kelompok	100%
					Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan.	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	100%	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
					Rincian :									
					Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat sosialisasi dan mengikuti gelar inovasi TTG	18 kelompok	18 kelompok	-	-	-	18 kelompok	18 kelompok	100%
					Pelatihan dan Penerapan TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat pelatihan dan penerapan TTG	36 kelompok	36 kelompok	-	-	-	36 kelompok	36 kelompok	100%
					Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan pra sarana desa	Jumlah fasilitasi pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan yang dilaksanakan	55 Desa	55 Desa	-	-	-	55 Desa	55 Desa	100%
					Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indicator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.3. (T-C. 30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	IKD terlampaui
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	45	25	10	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	75	150	200	225	IKK dan IKU terlampaui
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	74 %	76 %	78 %	80 %	-
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	86 %	87 %	88 %	89 %	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Angka Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi **0,7663** dari target kinerja sebesar **0,7535**, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **101,7%**. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai

periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.

8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor

strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

N o.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATAT AN PENTIN G
	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojoker to	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	7,443,123,6 32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojoker to	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	5,112,350,000	
		Kab. Mojoker to	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi			Kab. Mojoker to	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojoker to	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	90,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojoker to	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	7,500,000	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,500,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	40,000,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	6,311,973,632		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4,629,840,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6,266,973,632		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4,629,840,000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	45,000,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78%	25,000,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78%	0	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36 Paket	25,000,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	438,500,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	183,250,000	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,250,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	56,100,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	30,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	46,200,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,000,000	
		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	46,200,000		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	42,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	135,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	50,000,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	45,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	-	0	
		Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	45,000,000		Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	204,650,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	176,760,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,650,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,760,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	328,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	115,000,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	160,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	95,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	33,000,000			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000	
II	Program Penataan Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	350,000,000	Program Penataan Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	175,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan desa			Kab. Mojokerto	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	350,000,000	Penyelenggaraan Penataan desa			Kab. Mojokerto	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	175,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	350,000,000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	175,000,000	
III	Program Peningkatan Kerjasama Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	550,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	123,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	550,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	123,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota			Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota			Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	48,000,000	
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	11,525,000,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	7,720,822,717	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				11,525,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7,720,822,717	
		Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	300,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	30,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	299 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	299 Dokumen	20,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	350,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	75,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	850,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	150,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	300,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	40,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 Desa	200,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	

	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	150,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	20,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	300,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	75,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	350,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	40,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	300,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	30,000,000	
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	50,000,000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	7,000,000,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	6,885,822,717	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	700,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	225,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	37%		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	37%		

	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	525,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	80,000,000	
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				4,625,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				715,000,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	87%	3,525,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	87%	590,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	3,525,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	590,000,000	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	700,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	75,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Lembaga	1,100,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	210,000,000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	325,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	75,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	1,400,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	230,000,000	

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	1,100,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	125,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan	70%	1,100,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan	70%	125,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	500,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	75,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	600,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	50,000,000	
JUMLAH					24,493,123,632					13,846,172,717	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2024 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.5. berikut :

Tabel 2.5. (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa Kedungudi Kec. Trawas Kab. Mojokerto	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dan pemasaran produk unggulan desa	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran: Rp. 38.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
2	Bantuan Penyertaan Modal BUMDesa	Dsn. Garung Desa Bangeran Kec. Dawarbalandong Kab. Mojokerto	Sangat membutuhkan bantuan Keuangan untuk penyertaan atau Penguatan Modal Bumdes, demi peningkatan Bumdesa "Bangjozz" kedepan		Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
3	Bantuan Penyertaan Modal BUMDesa	Desa Jumeneng Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto	BUMDesa butuh bantuan pendanaan banyak ide ide yang tidak terealisasi karena kurangnya dana		Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
4	Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Dusun Sidotangi Ds. Cinandang Kec. Dawarbalandong Kab. Mojokerto	Kondisi rumah banyak yang rusak		Aspirasi masyarakat, usulan kembalikan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan

UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada pelaksanaan RPJMN di 2021. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka ekonomi makro. Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional, berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025, koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam di tahun 2021 dan berpengaruh di tahun 2022.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, sebagai berikut:

DRAFT TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024 :

“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2024 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global”**, dengan arah kebijakan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 :

Tema Pembangunan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah :

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”.

Adapun Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, adalah :

“Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan kualitas SDM melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan “

Sedangkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata;
2. Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan;
3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan;
4. Pembangunan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi;
5. Meningkatkan kualitas dan layanan dasar Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas;
6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritana Kes Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta keswadayaan masyarakat desa.

2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 2 : ” Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.” maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

” Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “

Dengan indikator tujuan : **“ Angka Indeks Desa Membangun “**

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7845
		Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	25 %
		Terwujudnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %
			Indeks Profesionalitas ASN	78 %
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2024. Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD) Tahun 2024.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto memuat **5 program, 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 13,846,172,717,-** berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Renja DPMD pada tahun 2024 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan

- Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Terselenggaranya Program Penataan Desa yang dilaksanakan sesuai kebutuhan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.

- 2) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kapasitas SDM Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. (T-C. 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No .	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBE R DANA	CATATAN PENTTIN G	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
I	2	1 3	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokert o	84,76 (A)	5,112,350,000	APBD II		85,26 (A)	8,122,170,995
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kab. Mojokert o	2 jenis inovasi				2 jenis inovasi	
	2	1 3	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Kab. Mojokert o	93%	7,500,000	APBD II		94%	90,000,000

	2	1 3	0 1	2.0 1	000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	6 Dokumen	7,500,000	APBD II		6 Dokumen	50,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 1	000 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	-	0	APBD II		18 Laporan	40,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokert o	90%	4,629,840,000	APBD II		90%	6,893,670,995
	2	1 3	0 1	2.0 2	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	33 Orang/14 bulan	4,629,840,000	APBD II		33 Orang/14 bulan	6,893,670,995
	2	1 3	0 1	2.0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kab. Mojokert o	78%	0	APBD II		79%	27,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 5	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	-	0	APBD II		36 Paket	27,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokert o	90%	183,250,000	APBD II		90%	478,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 Paket	27,250,000	APBD II		1 Paket	165,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	24 Paket	30,000,000	APBD II		24 Paket	58,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	30,000,000	APBD II		4 Paket	50,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	4,000,000	APBD II		12 Dokumen	5,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket	42,000,000	APBD II		3 Paket	50,000,000

	2	1 3	0 1	2.0 6	000 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	48 Laporan	50,000,000	APBD II		48 Laporan	150,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokerto	100%	0	APBD II		100%	50,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 7	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mojokerto	-	0	APBD II		3 Unit	50,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokerto	90%	176,760,000	APBD II		90%	255,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 8	000 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	8,760,000	APBD II		12 Laporan	15,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 8	000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	168,000,000	APBD II		12 Laporan	240,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Mojokerto	90%	115,000,000	APBD II		90%	327,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 9	000 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	17 Unit	95,000,000	APBD II		17 Unit	162,500,000
	2	1 3	0 1	2.0 9	000 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	-	0	APBD II		1 Unit	125,000,000

	2	1 3	0 1	2.0 9	001 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	20 Unit	20,000,000	APBD II		20 Unit	40,000,000
II	2	1 3	0 2				Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Kab. Mojokerto	20%	175,000,000	APBD II		20%	350,000,000
	2	1 3	0 2	2.0 1			Penyelenggaraan Penataan desa	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kab. Mojokerto	5 jenis	175,000,000	APBD II		5 jenis	350,000,000
	2	1 3	0 2	2.0 1	0006		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	4 Unit	175,000,000	APBD II		4 Unit	350,000,000
III	2	1 3	0 3				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto	10%	123,000,000	APBD II		10%	550,000,000
	2	1 3	0 3	2.0 1			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Kab. Mojokerto	220 Desa	123,000,000	APBD II		220 Desa	550,000,000
	2	1 3	0 3	2.0 1	000 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	75,000,000	APBD II		2 Dokumen	350,000,000
	2	1 3	0 3	2.0 1	000 3		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	48,000,000	APBD II		1 Dokumen	200,000,000
IV	2	1 3	0 4				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Kab. Mojokerto	91%	7,720,822,717	APBD II		92%	12,600,000,000

	2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7,720,822,717	APBD II			12,600,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1			Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	100%				100%	
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	30,000,000	APBD II		3 Dokumen	300,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	20,000,000	APBD II		299 Dokumen	200,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	75,000,000	APBD II		299 Dokumen	350,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	150,000,000	APBD II		299 Dokumen	900,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	100 Orang	40,000,000	APBD II		299 Orang	350,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	-	-	APBD II	Pilkades serentak	260 Desa	550,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	12 Laporan	20,000,000	APBD II		12 Laporan	175,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Mojokerto	18 Dokumen	75,000,000	APBD II		18 Dokumen	350,000,000

	2	1 3	0 4	2.0 1	001 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	36 Dokumen	40,000,000	APBD II		36 Dokumen	375,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	150 Orang	30,000,000	APBD II		150 Orang	350,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	75 Desa	50,000,000	APBD II		200 Desa	200,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	6,885,822,717	APBD II		12 Dokumen	7,200,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	225,000,000	APBD II		304 Dokumen	750,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1			Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	Kab. Mojokerto	37%				38%	
	2	1 3	0 4	2.0 1	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Mojokerto	50 Dokumen	80,000,000	APBD II		100 Dokumen	550,000,000
V	2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		Kab. Mojokerto		715,000,000	APBD II			5,000,000,000
	2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Kab. Mojokerto	86%	590,000,000	APBD II		87%	3,850,000,000

	2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Kab. Mojokerto	75%	590,000,000	APBD II	75%	3,850,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	75,000,000	APBD II	3 Dokumen	800,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto	479 Lembaga	210,000,000	APBD II	500 Lembaga	1,200,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	18 Laporan	75,000,000	APBD II	18 Laporan	350,000,000

	2	1 3	0 5	2.0 1	000 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	8 Dokumen	230,000,000	APBD II		8 Dokumen	1,500,000,000
	2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Kab. Mojokerto	76%	125,000,000	APBD II		78%	1,150,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	Kab. Mojokerto	70%	125,000,000	APBD II		70%	1,150,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	75,000,000	APBD II		3 Dokumen	550,000,000
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	3 Laporan	50,000,000	APBD II		3 Laporan	600,000,000
JUMLAH										13,846,172,717				26,622,170,995

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut:

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024
SESUAI RANCANGAN RENJA 2024

KODE SKPD : 2.13
NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

N o.	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	U P	B/ L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	RENJA 2024 (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
								OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGE T			SKP D Terk ait	Pag u (Rp)	K L	R p.	D/T B/ DA K
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
I	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,112,350,000	-	0	-	0	-
										Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	Kab. Mojoker to						

												Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	Kab. Mojokerto						
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		93%	Kab. Mojokerto	7,500,000	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			L	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	Kab. Mojokerto	7,500,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Penyusunan Renja, P- Renja, Dok. ARG									7,500,000					
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%	Kab. Mojokerto	4,629,840,000	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			L	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/ 14 bulan	Kab. Mojokerto	4,629,840,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									2,482,670,000					
						Tambahan Penghasilan ASN									2,046,970,000					
						Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN									100,200,000					

	2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		6 Dokum en	Kab. Mojoker to	183,250,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Kab. Mojokert o	27,250,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lap Top, AC, soud sysem)								27,250,000					
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24 Paket	Kab. Mojokert o	30,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat								30,000,000					
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	Kab. Mojokert o	30,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Pembuatan Iklan, Banner, foto copy)								30,000,000					

	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	Kab. Mojokerto	4,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Bahan bacaan (Koran)								4,000,000					
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			4 Paket	Kab. Mojokerto	42,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Penyediaan Alat Tulis Kantor								42,000,000					
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72 Laporan	Kab. Mojokerto	50,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah								50,000,000					
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	Kab. Mojokerto	176,760,000	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	Kab. Mojokerto	8,760,000	-	0	-	0	-

						Rincian :													
						Pembayaran jasa komunikasi / telpun								8,760,000					
	2	1 3	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	Kab. Mojokerto	168,000,000					
						Rincian :													
						Penyediaan tenaga Administrasi Kantor dan tenaga pengemudi								147,000,000					
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								21,000,000					
	2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	Kab. Mojokerto	115,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			17 Unit	Kab. Mojokerto	95,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (PKB & STNK)								15,000,000	-	0	-	0	-
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								80,000,000	-	0	-	0	-

	2	1 3	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi			20 Unit	Kab. Mojokert o	20,000,000	-	0	-	0	
						Rincian :												
						Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor							20,000,000					
II	2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA				Persentase Penyelenggara an Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	Kab. Mojoker to	175,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa			Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan		5 jenis	Kab. Mojoker to	175,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 2	2.0 1	000 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	L	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa			4 Unit	Kab. Mojokert o	175,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :												
						Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)							175,000,000					
III	2	1 3	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	Kab. Mojoker to	123,000,000	-	0	-	0	-

	2	1 3	0 3	2.0 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa				Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa		220 Desa	Kab. Mojokerto	123,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 3	2.0 1	000 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		L	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			4 Dokumen	Kab. Mojokerto	75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Fasilitasi / Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas BUMDesma dan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan								60,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi dan Pembinaan UPK PPK Mandiri								15,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 3	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1 Dokumen	Kab. Mojokerto	48,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan								48,000,000	-	0	-	0	-
IV	2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat		91%	Kab. Mojokerto	7,720,822,717					

	2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Persentase Desa yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	Kab. Mojokerto	7,720,822,717	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3 Dokumen	Kab. Mojokerto	30,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Fasilitasi Desa terkait Perbup hari dan jam kerja Pemerintah Desa serta Perbup, Standar Pelayanan Minimal Desa								30,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa			299 Dokumen	Kab. Mojokerto	20,000,000	-	-	-	-	-
						Rincian :													
						Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades								20,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			229 Dokumen	Kab. Mojokerto	75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													

						Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDesa								75,000,000					
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		L	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			299 Dokum en	Kab. Mojokert o	150,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Pendampingan Penyusunan APB Desa								20,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi/Pendampi ngan Alokasi Dana Desa (ADD)								30,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)								30,000,000	-	0	-	0	-
						Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa								50,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi								20,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 4	2.0 1	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		L	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		150	100 Orang	Kab. Mojokert o	40,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (Kaur/Kasi/Kadus)								40,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 4	2.0 1	001 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		L	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			12 Lapora n	Kab. Mojokert o	20,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													

						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									20,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		L	Jumlah Dokumen Profil Desa			18 Dokumen	Kab. Mojokerto		75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Up dating Profil desa dan Kelurahan									75,000,000					
						Fasilitasi/Pendampingan pendataan Potensi Desa Berdaya									0					
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		36	36 Dokumen	Kab. Mojokerto		40,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									40,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		L	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			150 Orang	Kab. Mojokerto		30,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									30,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		B	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa		75 Desa	Kab. Mojokerto		50,000,000	-	0	-	0	0

						Rincian :													
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							50,000,000						
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	L	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			12 Dokumen	Kab. Mojokerto	6,885,822,717	-	0	-	0	-	
						Rincian :													
						Fasilitasi Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS)							6,885,822,717	-	0	-	0	-	
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	L	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			304 Dokumen	Kab. Mojokerto	225,000,000	-	0	-	0	-	
						Rincian :													
						Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan							30,000,000	-	0	-	0	-	
						Fasilitasi Pemutakhiran Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun							45,000,000	-	0	-	0	-	
						Pendampingan dan Pembinaan Lomba Desa							100,000,000	-	0	-	0	-	

						Pendampingan electronic Human development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)							50,000,000					
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang		37%	Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	L	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			50 Dokumen	Kab. Mojokerto	80,000,000					
						Rincian :												
						Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa							80,000,000	-	0	-	0	-
V	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							715,000,000	-	0	-	0	-
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		86%	Kab. Mojokerto	590,000,000	-	0	-	0	-

	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Lembaga Kemasyarakan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		75%	Kab. Mojokerto	590,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		L	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	Kab. Mojokerto	75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :														
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pokja Posyandu									30,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPM									45,000,000	-	0	-	0	-

	2	1 3	0 5	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	L	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			479 Lembaga	Kab. Mojokerto	210,000,000					
						Rincian :												
						Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat							50,000,000	-	0	-	0	-
						Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto							110,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)							50,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			18 Laporan	Kab. Mojokerto	75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :												
						Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi							50,000,000	-	0	-	0	-
						Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							20,000,000	-	0	-	0	-

						Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Provinsi							5,000,000					
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			8 Dokumen	Kab. Mojokerto	230,000,000					
						Rincian :												
						Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK							50,000,000	-	0	-	0	-
						Perlombaan PKK Bidang umum							75,000,000	-	0	-	0	-
						Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto							25,000,000	-	0	-	0	-
						Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK							50,000,000	-	0	-	0	-
						Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong							30,000,000	-	0	-	0	-
						Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana							0	-	0	-	0	-
	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	Kab. Mojokerto	125,000,000	-	0	-	0	-

	2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Ekonomi Produktif dan diberdayakan		75%	Kab. Mojokert o	125,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			3 Dokum en		75,000,000	-	0	-	0	-
						Rincian :													
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								50,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan usaha ekonomi produktif								0	-	0	-	0	-
						Pembinaan Pasar Desa								25,000,000	-	0	-	0	-
	2	1 3	0 5	2.0 1	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3 Lapora n	Kab. Mojokert o	50,000,000	-	0	-	0	-

							Rincian :												
							Penyelenggaraan Workshop Teknologi Tepat Guna							42,500,000	-	0	-	0	-
							Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya desa (pamsimas)							7,500,000	-	0	-	0	-
JUMLAH TOTAL														13,846,172,717					

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus dilakukan pemetaan/mapping menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Mojokerto, Agustus 2023

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196808131996031002